

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pegawai pada organisasi dianggap sebagai sumberdaya atau aset. Berjalannya organisasi atau perusahaan bergantung pada perilaku- perilaku pegawai yang bekerja didalamnya. Selain itu pegawai juga merupakan sumber daya yang penting bagi organisasi karena memiliki bakat, kemampuan, tenaga dan kreativitas yang sangat dibutuhkan organisasi guna mencapai tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap pimpinan dalam organisasi diharapkan memiliki suatu aturan atau kebijakan. Kebijakan ini dibuat agar setiap pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja pegawai tersebut.

Kinerja pegawai bergantung pada kemampuan, bakat, usaha kerja pegawai dan kesempatan kerja yang ada. Kinerja pegawai yang baik akan menguntungkan organisasi karena pegawai bekerja secara maksimal dan optimal. Sebaliknya jika kinerja pegawai buruk maka organisasi tidak mampu bekerja secara maksimal dan optimal. Agar dapat meningkatkan kinerja pegawai organisasi diharapkan melakukan upaya seperti memperhatikan kepentingan-kepentingan pegawainya.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) adalah pelaksana daerah dibidang pendapatan daerah. BAPENDA bertugas untuk melakukan pemungutan penerimaan daerah dan melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam merencanakan, melaksanakan serta memantau pemungutan

penerimaan daerah. Badan Pendapatan Daerah merupakan Instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang memberikan pelayanan dan informasi terkait pajak kepada masyarakat. Untuk menghindari kecurangan pegawai dalam pemungutan pajak daerah, dibutuhkan sistem pengendalian internal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa “Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Pengendalian internal terhadap kinerja pegawai perlu untuk diperhatikan, Pengendalian dilakukan agar pelayanan yang diberikan dapat berkualitas dan kinerja pegawai meningkat. Untuk meningkatkan kinerja pegawai nya Badan Pendapatan Daerah memberikan imbalan yang layak atas prestasi kerja pegawai diluar gaji pokok yang diberikan setiap bulan. Salah satu bentuk imbalan yang diberikan adalah tambahan penghasilan pegawai. Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan salah satu sarana motivasi yang mampu mendorong pegawai agar lebih semangat dan giat dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Peraturan Walikota Kota Padang No 12 Tahun 2021 “ Tambahan Penghasilan Pegawai adalah imbalan yang diberikan oleh PEMDA kepada ASN setiap bulan sesuai dengan penilaian kinerja pegawai”.

Penilaian terhadap kinerja pegawai dilakukan pada saat sebelum pemberian tambahan penghasilan pegawai. Selain penilaian terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah memerlukan sistem pengendalian internal guna menghindari kemungkinan kecurangan yang timbul seperti pegawai yang tidak mencapai sasaran kerja mendapatkan tunjangan, pemberian tunjangan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dan kecurangan yang mungkin terjadi lainnya. Berdasarkan dari uraian tersebut, penulis berminat untuk membahas topik tersebut dengan judul “ **Sistem Pengendalian Internal Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pemberian tambahan penghasilan pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang ?
2. Bagaimana sistem pengendalian internal terhadap tambahan penghasilan pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang ?

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan pelaksanaan magang yang ingin dicapai penulis:

3. Untuk mengetahui tata cara pemberian tambahan penghasilan pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.
4. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal terhadap tambahan penghasilan pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.

1.4 Manfaat Magang

Adapun Manfaat dari pelaksanaan kegiatan magang ini adalah :

5. Bagi Penulis

- a. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang dipelajari selama kuliah dalam dunia kerja, sehingga mengetahui keadaan dunia kerja yang sesungguhnya.
- b. Dapat mengetahui tentang cara-cara, sistem, dan teknologi yang digunakan dalam dunia kerja.
- c. Menambah wawasan dan pengalaman mengenai dunia kerja.

6. Bagi Instansi

- a. Dapat merekrut mahasiswa yang dinilai berkualitas ke dalam Instansi.
- b. Dapat membantu kegiatan Instansi dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kerja.
- c. Menjalin hubungan baik antara Instansi dengan Universitas.

7. Bagi Universitas

- a. Sebagai sarana memperoleh kerja sama antara pihak perusahaan dengan Universitas khususnya Fakultas Ekonomi

- b. Mahasiswa dapat mempraktekan langsung apa yang telah dipelajari selamamasa perkuliahan

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang yang berlokasi di Jl. Moh Yamin No 70 Kp Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan waktu pelaksanaan magang berlangsung selama 40 hari.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

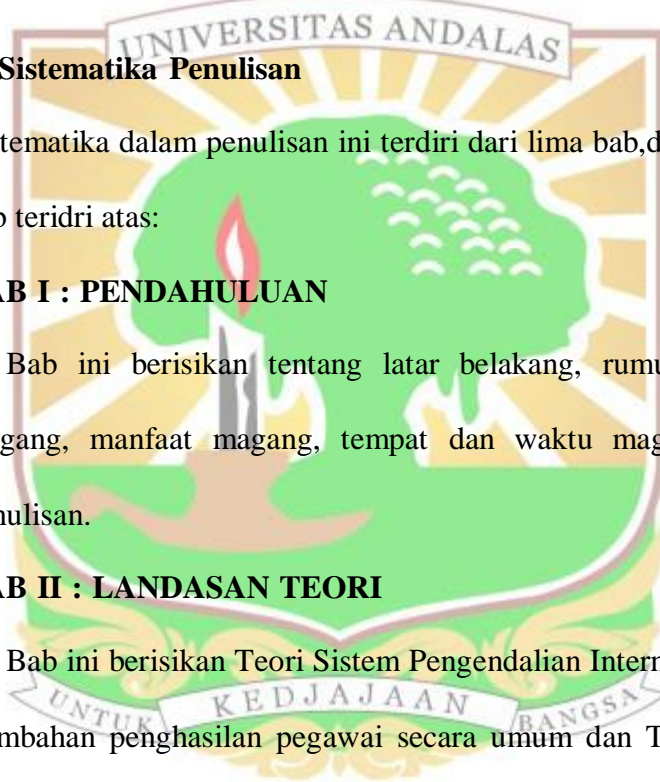
Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan Teori Sistem Pengendalian Internal secara umum, Teori Tambahan penghasilan pegawai secara umum dan Teori Kinerja pegawai secara umum.

BAB III : GAMBARAN UMUM BADAN

Bab ini membahas tentang sejarah umum, visi dan misi, struktur, organisasi serta bentuk kegiatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.



BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang penggunaan sistem pengendalian internal terhadap tambahan penghasilan pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) KotaPadang

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang membahas tentang kesimpulan dari pembahasan yang disajikan serta saran-saran untuk perbaikan kedepannya.

